

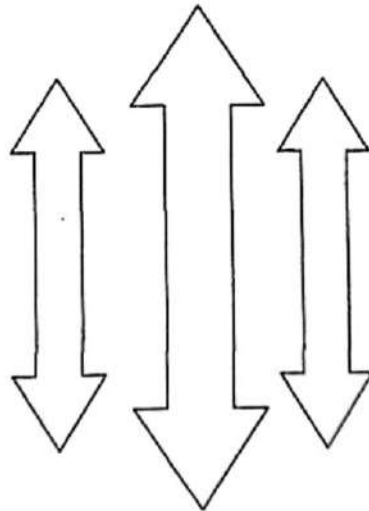


PERATURAN KALURAHAN KATONGAN

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KATONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kalurahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor);
20. Peraturan Desa Katongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Katongan Tahun 2020 Nomor 03);
21. Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 10);
22. Peraturan Desa Katongan 2 Nomor Tahun 2020 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 02);
23. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2023 Nomor 03);
24. Peraturan Kalurahan Katongan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Tahun 2023 Nomor 04);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
dan
LURAH KATONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun
Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Pendapatan Asli Kalurahan	: Rp. 11.940.000,-
b. Transfer	: Rp. 3.380.188.200,-
c. Pendapatan Lain – Lain	: <u>Rp. 25.632.153,-</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan	: Rp. 3.417.760.353,-

2. Belanja Kalurahan :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kal.	: Rp. 826.882.541,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	: Rp. 2.002.059.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan	: Rp. 21.719.551,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan	: Rp. 388.245.000,-
e. Belanja Tak Terduga	: <u>Rp. 126.976.000,-</u>
Jumlah Belanja Kalurahan	: Rp. 3.365.882.092,-
Surplus/(Defisit)	: Rp. 51.878.261,-

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 21.790.551,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	: <u>Rp. 50.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp. (28.209.449,-)

4. Silpa

: Rp. 23.668.812,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Kalurahan ini terdiri dari :

- a. Lampiran I. Laporan Keuangan Pemerintah Kalurahan Katongan Tahun Anggaran 2023.
- b. Lampiran II. Laporan Realisasi Kegiatan Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran 2023.
- c. Lampiran III. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program Lainnya yang masuk ke Kalurahan Tahun 2023.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Katongan
pada tanggal 22 Januari 2024



Diundangkan di Katongan
pada tanggal 22 Januari 2024

CARIK,

H A R I N O

Lembaran Kalurahan Katongan Tahun 2024 Nomor 01

LAMPIRAN I
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

Laporan Keuangan
 Pemerintah Kalurahan Katongan
 Kapanewon Nglipar
 Kabupaten Gunungkidul
 Tahun Anggaran 2023

Daftar Isi

	<i>hal.</i>
I. Laporan Realisasi APBKal	2
II. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Informasi Umum	3
B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan	3
C. Rincian Pos Laporan Realisasi Anggaran	
1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas	3
2. Pendapatan Asli Desa	3
3. Dana Desa	3
4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	3
5. Alokasi Dana Desa	4
6. Bantuan Keuangan Propinsi	4
7. Bantuan Keuangan Kabupaten	4
8. Pendapatan lain	4
9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	4
10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	5
11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	5
12. Belanja Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa	5
13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	5
14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi	5
15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)	6
16. Pembiayaan	7
17. Aset Kalurahan	7
18. Penyertaan Modal	7

Lampiran :

- Lampiran 1 - Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023
- Lampiran 2 - Program Sektoral dan Program Daerah Yang Masuk ke Kalurahan
- Lampiran 3 - Rincian Aset Tetap Kalurahan

**LAPORAN REALISASI APB KALURAHAN
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

	Anggaran	Realisasi	Laba/ Kurang
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Kalurahan	11.709.000	11.949.000	240.000
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	1.200.308.000	1.200.308.000	0
Bagian dari hasil pajak dan Retribusi Daerah	71.793.200	71.978.600	185.400
Alokasi Dana Desa	667.901.600	664.392.350	-3.509.250
Bantuan Keuangan Propinsi	1.325.000.000	1.325.000.000	0
Bantuan Keuangan Kabupaten	109.000.000	109.000.000	0
Pendapatan Lain	24.328.743	25.832.153	1.503.410
JUMLAH PENDAPATAN	3.410.031.543	3.414.251.103	(4.219.500)
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	828.129.120	823.373.291	4.755.829
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	2.002.059.000	2.002.059.000	0
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	21.719.551	21.719.551	0
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	389.445.000	388.245.000	1.200.000
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	140.469.423	126.976.000	13.493.423
JUMLAH BELANJA	3.381.822.094	3.362.372.842	19.449.252
SURPLUS/(DEFISIT)	28.209.449	51.878.261	-23.668.812
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	21.790.551	21.790.551	0
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	0
SELISIH PEMBIAYAAN	-28.209.449	-28.209.449	0
SILPA TAHUN BERJALAN	0	23.668.812	-23.668.812

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Katongan, 22 Januari 2024



**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN ANGGARAN 2023**

A. Informasi Umum

Pemerintah Kalurahan Katongan merupakan Kalurahan di Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 141/108/PG/KPTS/2018 Tanggal 26 November 2018, saat ini kepengurusan Pemerintahan Kalurahan Katongan :

1. Lurah : JUMAWAN
2. Carik : HARINO
3. Kaur Danarta : MURTINI

Kantor Pemerintah Kalurahan beralamat di Jl. Nglipar - Ngawen Km. 04 Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kalurahan berupa Laporan Realisasi APBKalurahan sesuai basis kas dengan dasar harga, perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan belanja ja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas

SILPA Tahun Anggaran 2023	23.668.812
Mutasi Potongan Pajak	
- Saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0
- Penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan	192.177.593
- Setoran pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan	192.177.593
- Saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke Kas Negara	0
Saldo Kas per 31 Desember 2023	23.668.812

2. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
a. Hasil Usaha	1.500.000	1.500.000	0
b. Hasil Aset	9.600.000	9.840.000	240.000
c. Swadaya, partisipasi, dan Gotong royong	0	0	0
d. Pendapatan Asli Desa lain	600.000	600.000	0
	11.700.000	11.940.000	240.000

Ket : Surplus Pendapatan dikarenakan peningkatan hasil Sewa Kios

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan Kalurahan yang diperoleh dari APBN, Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1 (Non BLT)	360.092.400	360.092.400	0
Tahap 1 (BLT)	30.600.000	30.600.000	0
Tahap 2 (BLT)	30.600.000	30.600.000	0
Tahap 2 (Non BLT)	360.092.400	360.092.400	0
Tahap 3 (BLT)	30.600.000	30.600.000	0
Tahap 3 (Non BLT)	357.723.200	357.723.200	0
Tahap 4 (BLT)	30.600.000	30.600.000	0
	1.200.308.000	1.200.308.000	0

4. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

a. Penerimaan Kalurahan yang berasal dari bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	35.896.000	35.896.000	0
Tahap 2	35.896.000	35.896.000	-
	71.792.000	71.792.000	0

b. Penerimaan Kalurahan dari kekurangan bagian hasil pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	6.185.400	6.185.400	0
Tahap 2	0	0	0
	6.185.400	6.185.400	0

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Tahap 1	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 2	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 3	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 4	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 5	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 6	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 7	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 8	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 9	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 10	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 11	55.658.000	55.658.000	0
Tahap 12	55.663.600	55.663.600	0
	667.901.600	667.901.600	0

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi DIY adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
	1.325.000.000	1.325.000.000	0

7. Bantuan Keuangan Kabupaten

Penerimaan Kalurahan yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten Gunungkidul adalah :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan Padukuhan	100.000.000	100.000.000	0

8. Pendapatan Lain

Pendapatan Lain terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Penerimaan dari hasil Kerjasama Antar Kalurahan	0	0	0
Penerimaan dari hasil Kerjasama Kalurahan dengan pihak ke tiga	0	0	0
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga	0	0	0
Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Kalurahan	0	0	0
Bunga Bank	2.828.743	4.132.153	1.303.410
Pendapatan Lain Desa yang sah	0	0	0
- Bantuan Sosial UPK	16.000.000	16.000.000	0
- Hadiah Perlombaan dari Kapanewon	5.500.000	5.500.000	0
	24.328.743	25.632.153	1.303.410

Ket. : Surplus Pendapatan berasal Pendapatan Bunga Bank

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Pegawai	638.448.160	634.748.300	3.699.860
Belanja Barang dan Jasa	181.680.960	180.824.941	1.056.019
Belanja Modal	0.000.000	0.000.000	0
	820.129.120	815.573.241	4.555.879

Ket. : Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	96.060.000	96.060.000	0
Belanja Modal	1.905.999.000	1.905.999.000	0
	2.002.059.000	2.002.059.000	0

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Belanja untuk bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	21.719.551	21.719.551	0
Belanja Modal	0	0	0
	21.719.551	21.719.551	0

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Barang dan Jasa	309.445.000	308.245.000	1.200.000
Belanja Modal	80.000.000	80.000.000	0
	389.445.000	388.245.000	1.200.000

Ket. : Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2023, Pemerintah Kalurahan melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Belanja Tidak Terduga	140.469.423	126.978.000	13.491.423
	140.469.423	126.978.000	13.491.423

Ket. : Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

14. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Pegawai			
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades	44.590.000	44.590.000	0
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	504.800.000	504.800.000	0
Jaminan kesehatan Kades dan Perangkat Desa	35.108.160	35.108.160	0
Tunjangan BPD	53.950.000	53.950.000	0
	638.448.160	638.448.160	0
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja barang perlengkapan kantor	142.275.511	141.874.990	400.521
Belanja jasa honorarium	142.000.000	141.000.000	1.000.000
Belanja Perjalanan Dinas	5.390.000	5.390.000	0
Belanja jasa sewa	9.250.000	9.250.000	0
Belanja operasional Perkantoran	26.740.000	27.249.532	(509.532)
Belanja pemeliharaan	2.000.000	1.835.000	165.000
Belanja Barang dan Jasa yg diserahkan masy.	281.280.000	280.090.000	1.200.000
	608.905.511	606.549.492	2.256.019

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Modal

Belanja Modal Pengadaan Tanah			0
Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan alat berat	88.000.000	88.000.000	0
Belanja Modal Kendaraan	0	0	0
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	1.079.110.000	1.079.110.000	0
Belanja Modal Jalan	796.889.000	796.889.000	0
Belanja Modal Jembatan	0	0	0
Belanja modal Irigasi/Embung/Drainase	30.000.000	30.000.000	0
Belanja Modal Jaringan/Instalasi	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
	1.993.999.000	1.993.999.000	0

15. Belanja Kalurahan dalam Klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
Sub bidang penyel belanja Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemdes	739.336.120	739.554.541	-218.421
Sub bidang sarana dan prasarana Pemdes	10.000.000	9.835.000	165.000
Sub bidang Admiduk, pencat sipil, statistik, arsip	17.750.000	16.750.000	1.000.000
Sub bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan	59.843.000	59.843.000	0
Sub Bidang Pertanahan	1.200.000	900.000	300.000
	828.129.120	826.882.541	1.246.579

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
Sub bidang Pendidikan	47.200.000	47.200.000	0
Sub bidang Kesehatan	42.400.000	42.400.000	0
Sub bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	1.485.399.000	1.485.399.000	0
Sub bidang Kawasan Pemukiman	15.000.000	15.000.000	0
Sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0	0
Sub bidang Perhub, Komunikasi dan Informa	0	0	0
Sub bidang Energi & Sumber Daya Mineral	0	0	0
Sub bidang Pariwisata	412.060.000	412.060.000	0
	2.002.059.000	2.002.059.000	0

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
Sub bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	10.379.000	10.379.000	0
Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan	1.800.000	1.800.000	0
Sub bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.800.000	1.800.000	0
Sub bidang Kelembagaan Masyarakat	7.740.551	7.740.551	0
	21.719.551	21.719.551	0

Ket. : - Surplus belanja berasal dari efisiensi dan penghematan anggaran

Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
Sub bidang Kelautan dan Perikanan	0	0	0
Sub bidang Pertanian dan Peternakan	241.075.000	239.875.000	1.200.000
Sub bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kalurahan	0	0	0
Sub bidang Pemberd Perempuan, Perlin anak & Klg	4.000.000	4.000.000	0
Sub bidang Koperasi, UMKM	141.380.000	141.380.000	0
Sub bidang dukungan Penanaman Modal	2.990.000	2.990.000	0
Sub bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0	0
	389.445.000	388.245.000	1.200.000

Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
Sub bidang Penanggulangan Bencana	18.069.423	4.576.000	13.493.423
Sub bidang Keadaan Darurat	0	0	0
Sub bidang Keadaan Mendesak	122.400.000	122.400.000	0
	140.469.423	126.976.000	13.493.423

16. Pembiayaan

Jumlah Netto Pembiayaan tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

	Anggaran	Realisasi	Lebih/ Kurang
Penerimaan Pembiayaan	21.790.551	21.790.551	0
Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000	0
	(28.209.449)	(28.209.449)	0
Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :			
1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	21.790.551	21.790.551	0
2. Pencairan Dana Cadangan	0	0	0
	21.790.551	21.790.551	0

17. Aset Kalurahan

Perolehan Aset Kalurahan adalah sebagai berikut ;

	2022	2023	Perubahan/ Pengurangan
Tanah	160.000.000	160.000.000	0
Peralatan dan Mesin	312.652.150	400.652.150	88.000.000
Gedung dan Bangunan	5.141.523.300	6.220.623.300	1.079.100.000
Jalan, Jaringan dan Instalasi	6.125.731.028	6.952.620.028	826.889.000
Aset tetap lainnya	250.000.000	250.000.000	0
Konstruksi dalam pengerjaan	0	0	0
	11.989.906.478	13.983.905.478	1.994.000.000

Rincian Aset Tetap untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran

18. Penyertaan Modal

	2022	2023	Perubahan/ Pengurangan
- BUMKal Mapan Katongan 2023	100.000.000	100.000.000	0
- BUMKal Bersama Ngipar 2023	0	50.000.000	50.000.000
	100.000.000	150.000.000	50.000.000

- Ket. :
- Penyertaan Modal ke-1 BUMKal Katongan di TA 2018 Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Penyertaan Modal ke-2 BUMKal Katongan di TA 2021 Sebesar Rp. 50.000.000,-
 - Tidak ada penambahan penyertaan modal untuk BUMKal Katongan di TA 2022 dan TA 2023



LAMPIRAN II
 PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAH BELANJA
 KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

LAPORAN REALISASI KEGIATAN
 PERIODE 1 JANUARI - 31 DESEMBER
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kalurahan : KATONGAN
 Kabupaten : NGLIPAR
 Kabupaten : GUNUNGKIDUL
 Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KODE REKENING	URAIAN	NAMA OUTPUT	RENCANA			REALISASI		
			Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
4	PENDAPATAN							
4 1	Pendapatan Asli Desa			11.700.000			11.940.000	100
4 1 1	Hasil Usaha Desa							
4 1 1 01	Bagi Hasil BUMDes		tahun	1.500.000	1	tahun	1.500.000	100
4 1 1 2	Hadiri Asli Desa							
4 1 2 01	Hadiri Kos Mula Desa		tahun	9.600.000	1	tahun	9.840.000	102
4 1 2 02	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa							
4 1 2 03	Hasil pengelolaan tanah kas desa		tahun	600.000	1	tahun	600.000	100
4 2	Pendapatan Transfer							
4 2 1	Dana Desa			3.374.002.800			3.380.188.200	100
4 2 1 01	Dana Desa dari APBN		Lu	1.200.308.000	1	Lu	1.200.308.000	100
4 2 1 02	Bagian dari hasil pajak dan retribusi		Lu	71.793.200	1	Lu	77.678.800	108
4 2 1 03	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota							
4 2 1 04	Alokasi Dana Desa		Lu	667.901.600	1	Lu	687.901.600	103
4 2 1 05	Alokasi Dana Desa (ADD)		Lu	1.325.000.000	1	Lu	1.325.000.000	100
4 2 1 06	Bantuan Keuangan Propinsi							
4 2 1 07	Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi							
4 2 1 08	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota							
4 2 1 09	Bantuan Keuangan untuk Pembangunan Perumahan							
4 3	Pendapatan Lain-Lain			24.328.743			24.328.743	100
4 3 1	Bunga Bank		bulat	2.828.743	12	bulat	2.828.743	100
4 3 2	Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Lain							
4 3 2 01	Hadiah Perforansi		Lu	3.000.000	1	Lu	3.000.000	100
4 3 2 02	Bantuan sosial dari UPR		Lu	16.000.000	1	Lu	16.000.000	100

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE KALUJARAN

Tanggal : 31 DESEMBER 2023
 Kalurahan : KATONGAN
 Kapanewon : NGLIPAR
 Kabupaten : GUNUNGKIDUL
 Propinsi : DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

No	Program	Kegiatan				Anggaran	
		Jenis	Lokasi	Vol	Satuan	Jumlah	Sumber Dana
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA						2
						5.249.573.000	
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
a.	Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Kabupaten						
-	Rekonstruksi/Peningkatan Kapasitas Jalan Kab.	Ruas Jalan Wolgalih - Watusigar	1	paket	168.751.000	APBD KAB	
-	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Padukuhan Ngrandu	1	paket	97.000.000	APBD KAB	
b.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarpras Jalan Kabupaten						
-	Pembangunan Talud Jalan Kab.	Ruas Jalan Wolgalih - Watusigar	1	paket	62.827.000	APBD KAB	
c.	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Pertanian						
-	Pembangunan Embung Pertanian	Padukuhan Ngrandu	1	paket	120.000.000	APBD KAB	
d.	Pembangunan/Rehabilitasi Jembatan Kabupaten						
-	Pembangunan Jembatan Gantung	Padukuhan Jeruklegi - Klegung	1	paket	3.823.000.000	APBN	
e.	Pembangunan Sarana Prasarana Pemukiman						
-	Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	6 Padukuhan	40	paket	800.000.000	APBD PROP	
-	Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Padukuhan Klegung	10	paket	175.000.000	APBD PROP	
							0
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA						
						501.000.000	
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA						
-	Program Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	6 Padukuhan (835 KK)	6	paket	501.000.000	APBN	
							0
						5.747.573.000	



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
KALURAHAN KATONGAN

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Alamat : Jln. Nglipar-Ngawen Km 05 Katongan, Nglipar, Gunungkidul, DIY Kode Pos 55852

RINCIAN ASET TETAP

Per 31 Desember 2023

No	Klas Aset dan Nama/Identitas Aset Tetap	Bukti Kepemilikan			Kode Aset Tetap	Thn Perolehan	Nilai Perolehan	Kond Aset	Keterangan
		Jenis	Nomor	Tanggal					
	Tanah					150.000.000			
1	Tanah Balai Dusun Ngrandu Persil 87 / V	Pekarangan			1	1990	32.000.000	B	
2	Tanah Balai Dusun Kepuharsi Persil 294 / IV	Pekarangan			1	1990	30.000.000	B	
3	Tanah Balai Dusun Jerukiegi	Pekarangan			1	1991	34.000.000	B	
4	Tanah Balai Dusun Klegung Persil 175 / IV	Pekarangan			1	1990	33.000.000	B	
5	Tanah Balai Dusun Perbutan Persil 424	Pekarangan			1	1991	31.000.000	B	
1	Tanah Pelungguh Klas S.II Persil 61, Luas 700 m ²	Sawah			1		0	B	Harga belum dikelahui
2	Tanah Pelungguh Klas S.II Persil 61, Luas 2.882 m ²	Sawah			1		0	B	
3	Tanah Pelungguh Klas S.III Persil 124, Luas 7.839 m ²	Sawah			1		0	B	
4	Tanah Kas Kalurahan Klas S.III Persil 124, Luas 5.114 m ²	Sawah			1		0	B	
5	Tanah Pelungguh Klas S.II Persil 125, Luas 3.295 m ²	Sawah			1		0	B	
6	Tanah Pelungguh Klas S.III Persil 125, Luas 7.192 m ²	Sawah			1		0	B	
7	Tanah Kas Kalurahan Klas S.II Persil 55, Luas 1.194 m ²	Sawah			1		0	B	
8	Tanah Pelungguh Klas S.III Persil 124, Luas 1.579 m ²	Sawah			1		0	B	
9	Tanah Kas Kalurahan Klas S.II Persil 56, Luas 2.808 m ²	Sawah			1		0	B	
10	Tanah Kas Kalurahan Klas S.III Persil 124, Luas 754 m ²	Sawah			1		0	B	
11	Tanah Pelungguh Klas S.IV Persil 101, Luas 2.725 m ²	Sawah			1		0	B	
12	Tanah Pelungguh Klas S.V Persil 101, Luas 7.520 m ²	Sawah			1		0	B	
13	Tanah Pelungguh Klas S.V Persil 118, Luas 321 m ²	Sawah			1		0	B	
14	Tanah Pelungguh Klas S.II Persil 56, Luas 14.417 m ²	Sawah			1		0	B	
15	Tanah Pelungguh Klas S.II Persil 61, Luas 304 m ²	Sawah			1		0	B	
16	Tanah Kas Kalurahan Klas S.III Persil 124, Luas 233 m ²	Sawah			1		0	B	
17	Tanah Kas Kalurahan Klas S.III Persil 55, Luas 630 m ²	Sawah			1		0	B	

2	Meja kerja 10 unit					2	2000	4.000.000	B
3	Kursi Rapat Besi 120 unit					2	2002	10.200.000	B
4	Kursi tamu 2 paket					2	2005	3.700.000	B
5	Meja tamu 2 unit					2	2005	1.000.000	B
6	Papan tulis 2 unit					2	2006	160.000	B
7	Kursi tunggu 4 unit					2	2007	680.000	B
8	Jam Dinding 1 unit					2	2007	50.000	RR
9	Almari kayu 6 unit					2	2007	12.000.000	B
10	Meja Rapat Kayu 9 unit					2	2007	6.300.000	B
11	Print ;								
	> EPSON L110					2	2010	1.950.000	B
	> BROTHER HL-1201					2	2010	1.713.500	B
12	Komputer ;								
	> Komputer PC 2 unit					2	2010	4.000.000	B
	> Komputer PC HP					2	2013	4.500.000	B
13	Meja Komputer 1 unit					2	2010	600.000	RR
14	Camera Digital Canon 1 unit					2	2010	2.000.000	B
15	Handycamp SONY 1 unit					2	2010	3.500.000	B
16	Almari pelayanan 2 unit					2	2010	4.000.000	B
17	Televisi merek Akari 21" 1 unit					2	2013	750.000	B
18	Parabola 1 unit					2	2014	450.000	B
19	Resiver 1 unit					2	2014	300.000	B
20	Laptop ;								
	> Merek Asus 10" 1 unit					2	2015	5.000.000	S
	> Toshiba 5 unit					2	2015	35.000.000	S
	> ACER					2	2021	8.000.000	S
21	LCD dan Proyektor					2	2016	5.000.000	S
22	Soundsystem rapat 1 unit					2	2016	5.000.000	S
23	Dispenser Miyako 2 unit					2	2016	500.000	S
24	Wferles 1 unit					2	2016	600.000	S
25	Kipas angin tempal 2 unit					2	2016	400.000	S
26	Pigura 8 buah					2	2017	180.000	S
27	Box arsip 5 unit					2	2017	1.250.000	S
28	Meja Rapat Kaca 8 unit					2	2017	8.000.000	S
29	Kursi chitosa 70 unit					2	2017	35.000.000	S

4	Umbung 1 buah				2	2015	60.000	B	
5	Cawat 2 buah				2	2015	84.000	B	
6	Piring Prasmanan 4 buah				2	2016	96.000	B	
7	Gelas Kecil 100 buah				2	2016	200.000	B	
8	Serndok 24 buah				2	2017	20.000	B	
9	Tutup gelas 50 buah				2	2017	28.000	B	
10	Magic com Miyako 1 unit				2	2018	500.000	B	
11	Jumbo 2 buah				2	2018	340.000	B	
12	Gelas Besar 13 buah				2	2018	58.500	B	
13	Galon air 4 buah				2	2019	200.000	B	
							6.220.633.300		
III Gedung dan Bangunan									
1	Kantor Desa 1 luas 100 m ²				3	1980	125.250.000	B	
2	Kantor Desa 2 luas 240 m ²				3	1980	209.353.500	RR	
3	Balai Desa luas 240 m ²				3	2004	945.630.000	B	
4	Mushola Desa				3	2013	32.000.000	B	
5	Dapur Desa				3	2014	17.000.000	B	
6	Kamar Mandi Desa 2 Unit				3	2000	10.500.000	B	
7	Gedung TK				3	2008	143.736.500	RR	
8	Kios Desa								
1	Kios Desa 4 unit, luas 64 m ²				3	2013	214.000.000	B	
2	Kios Desa 2 unit luas 32 m ²				3	2014	53.500.000	B	
3	Kios Desa 2 unit luas 40 m ²				3	2013	75.500.000	B	
4	Kios Desa 2 unit luas 32 m ²				3	2016	65.430.000	B	
5	Kios Desa 2 unit luas 32 m ²				3	1980	49.465.000	RS	
6	Los pasar Desa luas 800 m ²				3	2012	317.162.000	B	
9	Rehab Kamar Mandi Desa				3	2018	4.209.000	B	
10	Gedung Paud Ngrandu				3	2017	104.068.300	B	
11	Pembangunan Gapura				3	2017	47.923.000	B	
12	Penyempurnaan Balai Dusun Kepuhari				3	2017	15.000.000	B	
13	Pembangunan Tugu Gang Rt Dusun Ngrandu				3	2016	10.402.500	B	
14	Rehab Balai Padukuhan Klegung				3	2015	10.000.000	B	
15	Rehab Balai Padukuhan Ngrandu				3	2015	10.000.000	B	
16	Pembangunan gedung PAUD/Jenruk Legi				3	2014	127.677.000	B	
17	Gedung PAUD/Nglebak				3	2011	186.736.000	B	

No	Uraian	4	2020	38.500.000	B
1	Rehab Aspal Jalan Padukuhan Perbutan	4	2023	137.397.000	B
2	Rehab Aspal Jalan Padukuhan Klegung	4	2023	137.397.000	B
3	Rehab Aspal Jalan Padukuhan Jeruklegi	4	2023	137.397.000	B
4	Cor Blok Jalan Padukuhan Nglebak RT 005	4	2023	53.747.000	B
5	Cor Blok Jalan Padukuhan Nglebak RT 003	4	2023	30.000.000	B
6	Cor Blok Jalan Padukuhan Ngrandu (Padat karya Jogja Istimewa)	4	2023	175.000.000	B
7	Pembangunan Talud & Rehab Buk Deker Padukuhan Ngrandu RT 001	4	2023	61.588.000	B
8	Pembangunan Talud Jalan Padukuhan Kepuhsari	4	2023	64.363.000	B
9	Jalan Lingkungan Wisata di Kawasan Pesona 17	4	2022	207.714.000	B
10	Talud Jalan Padukuhan Ngrandu RT 001	4	2022	69.107.000	B
11	Talud Pengaman Padukuhan Jeruklegi	4	2022	32.456.000	B
12	Talud Jalan Padukuhan Jeruklegi	4	2022	19.680.000	B
13	Cor Rabat Beton Jalan Padukuhan Jeruklegi	4	2022	70.000.000	B
14	Cor Rabat Beton Jalan Padukuhan Kepuhsari RT 006	4	2022	25.000.000	B
15	Aspal Jalan Lingkungan Padukuhan Kepuhsari RT 007	4	2022	50.000.000	B
16	Aspal Jalan Lingkungan Padukuhan Kepuhsari RT 005	4	2022	100.000.000	B
17	Cor Blok Beton Padukuhan Nglebak (PKTD Dais)	4	2022	175.000.000	B
18	Cor Rabat Beton Jalan Padukuhan Nglebak	4	2022	30.000.000	B
19	Rehab cor rabat ruas Kepuhsari-Pakisaj	4	2021	34.236.250	B
20	Cor rabat padukuhan Jeruklegi	4	2021	9.800.000	B
21	Cor rabat padukuhan Kepuhsari RT 06	4	2021	9.800.000	B
22	Cor rabat padukuhan Klegung RT 03	4	2021	15.050.000	B
23	Cor rabat padukuhan Nglebak RT 06	4	2021	10.150.000	B
24	Cor rabat padukuhan Ngrandu RT 08	4	2021	10.010.000	B
25	Cor rabat padukuhan Perbutan	4	2021	40.050.000	B
26	Talud jalan dan taman Kelurahan Kalonggan	4	2021	80.247.800	B
27	Rehab Aspal Jalan Desa Nglebak RT 04 & Kepuhsari	4	2020	317.253.750	B
28	Cor Rabat Jalan Dusun Kepuhsari	4	2020	50.000.000	B
29	Rehab Aspal Klegung volume 800 m	4	2019	180.737.000	B
30	Cor Rabat Jalan Ngrandu	4	2019	188.185.200	B

31	Talud Jalan Nglebak					4	2019	51.846.000	B
32	Talud jalan Kepuhsari					4	2019	48.395.816	B
33	Cor Rabat Jalan Kepuhsari					4	2019	56.221.327	B
34	Perkerasan jalan & Cor Rabat Perbutan Volume					4	2019	153.883.400	B
35	Rehab Aspal Jalan Kepuhsari					4	2019	69.535.600	B
36	Cor rabat Jalan Jeruklegi					4	2019	7.450.000	B
37	Cor Rabat Jalan Perbutan					4	2019	7.450.000	B
38	Talud Jalan Ngrandu					4	2019	15.075.333	B
39	Talud Jalan Kepuhsari					4	2019	15.075.333	B
40	Cor Rabat Jalan Nglebak					4	2019	15.075.333	B
41	Cor Rabat Jalan Klegung					4	2019	15.075.333	B
42	Talud Jalan Jeruklegi					4	2019	15.075.333	B
43	Cor Rabat Perbutan					4	2019	15.075.335	B
44	Rehab aspal jeruklegi					4	2018	203.920.000	B
45	Talud Jalan Jeruklegi					4	2018	20.170.000	B
46	Talud Jalan Jeruklegi					4	2018	25.735.000	B
47	Talud Jalan Jeruklegi					4	2018	17.285.000	B
48	Talud Jalan Jeruklegi					4	2018	24.930.000	B
49	Rehab aspal kepuhsari					4	2018	103.965.000	B
50	Rehab aspal Nglebak					4	2018	144.965.000	B
51	Talud Jalan Nglebak					4	2018	24.840.000	B
52	Cor Rabat Jeruklegi					4	2018	16.875.000	B

4	Drainase Ngrandu					2017	87.245.000	B	
5	Saluran Air Tepi Lapangan Desa Ngrandu					2016	34.666.000	B	
6	Gorong-gorong Jalan ke Lap. Desa Ngrandu					2016	66.730.000	B	
7	Gorong-gorong Jeruklegi					2016	34.326.400	B	
8	Gorong - gorong bus beton/Nglebak					2014	44.772.000	B	
9	Gorong - gorong Plat/Klegung					2013	29.928.500	B	
10	Rehab Gorong - gorong Plat/Klegung					2013	42.205.500	B	
11	Drainase/Klegung					2013	73.723.500	B	
12	Drainase/Klegung					2013	32.856.000	B	
13	Pembangunan Teteg Bendungan Sungai					2023	30.000.000	B	
3	Jembatan								
1	Jembatan Crossway Klegung					2010	120.983.000	B	
2	Jembatan Natah (Wotgalih-Klegung)					2016	75.000.000	B	
3	Rehab Jembatan Gantung Jeruklegi					2019	52.550.000	B	
IV	Aset Tetap Lainnya						250.000.000		
VI	Konstruksi dalam Pengerjaan								
Total Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2023								13.563.905.478	

7 Diisi dengan Baik (B), Rusak Ringan (RP), dan Rusak Berat (RB)

Katongan, 31 Desember 2023
Pembantu Pengelola Aset



APIN BENTI WIROWO



KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR
PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN

Alamat : Jln. Nglipar – Ngawen Km. 05 Katongan, Nglipar, Gunungkidul

Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KATONGAN
DAN
LURAH KATONGAN
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN KATONGAN

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Nomor : 01/Bamuskal/2024

Nomor : 01/Pemkal/2024

Pada hari ini *senin* tanggal *dua puluh dua* bulan *januari* tahun *dua ribu dua puluh empat* bertempat di Balai Kalurahan Katongan, Kapanewon Nglipar, Kabupaten Gunungkidul, pada acara rapat bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan untuk menyepakati Peraturan Kalurahan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat di Katongan dan ditanda tangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Katongan dan Lurah Katongan.

Katongan, 22 Januari 2024

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan


SAMUDRO WIHARJO

Lurah Katongan


JUMARTAN



PEMERINTAH KALURAHAN KATONGAN
KAPANEWON NGLIPAR
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat : Jl. Nglipar - Ngawen Km.05, Katongan, Nglipar, Gunungkidul, D. I. Yogyakarta




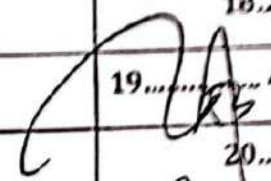


DAFTAR HADIR
SIDANG BERSAMA PEMERINTAH KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
PERATURAN KALURAHAN KATONGAN NOMOR 1 TAHUN 2024
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Hari : SENIN

Tanggal : 22 Januari 2024

Tempat : Balai Kalurahan Katongan

No	Nama	Jabatan	TandaTangan
1	SAMADI HARTO WIHARJO	Ketua BPKal	1. [Signature]
2	SUROTO, S.Sos	Wakil Ketua BPKal	2. [Signature]
3	SUKIRMANTORO, SPd	Sekretaris BPKal	3. [Signature]
4	TUKARJO	Kabid Pemerintahan Desa dan Pembinaan Kemasyarakatan BPKal	4. [Signature]
5	WASIAT	Kabid Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat BPKal	5. [Signature]
6	SUKIMIN	Anggota BPKal	6. [Signature]
7	KISMI SULJANA, AMK. AK	Anggota BPKal	7. [Signature]
8	SAMTA	Anggota BPKal	8. [Signature]
9	RINA SRI LISTIANA	Anggota BPKal	9. [Signature]
10	JUMAWAN	Lurah	10. [Signature]
11	HARINO	Carik	11. [Signature]
12	IMAN SANTOSA	Jagabaya	12. [Signature]
13	AZEF KURNIAWAN	Ulu - Ulu	13. [Signature]
14	WAWAN GUNARJO, SPdI	Kaimituwa	14. [Signature]
15	MURTINI	Kaur Danarta	15. [Signature]

16	APIN BEKTI WIBOWO	Kaur Tata Laksana	16..... 
17	YUNIARTI	Kaur Pangripta	17..... 
18	SUDIANTO	Staf Pamong Kalurahan	18..... 
19	SUMIJA	Staf Pamong Kalurahan	19..... 
20	RIKA DWI KURNIAWATI	Staf Pamong Kalurahan	20..... 
21	SUNARNO	Staf Pamong Kalurahan	21..... 



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON NGLIPAR

Kapanewu Nglipar

Jalan Nglipar-Sambipitu, Nglipar Gunungkidul, 55852 Telp/Fax :

Posel : nglipar@gunungkidulkab.go.id, Laman : nglipar.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU NGLIPAR
NOMOR 03 /KPTS/2024
TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN KATONGAN
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PANEWU NGLIPAR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK 07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;

- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan;
- 15 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 16 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023, yang meliputi :

I. PENDAPATAN

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Pendapatan Asli Desa | Rp. 11.940.000,- |
| 2. Dana Transfer | Rp.3.380.188.200,- |
| 3. Pendapatan lain-lain | Rp. 25.632.153,- |

II. BELANJA

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp.826.882.541,- |
| 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp.2.002.059.000,- |
| 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp. 21.719.551,- |
| 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp.388.245.000,- |
| 5. Bidang Penanggulangan Bencana | Rp. 126.976.000,- |

III. PEMBIAYAAN

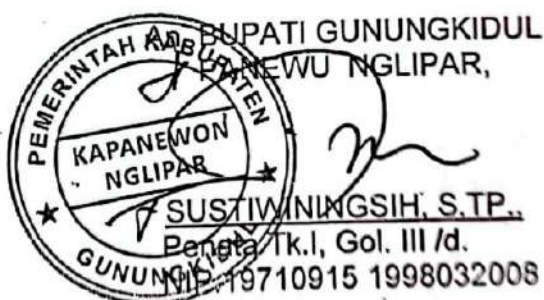
- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 21.790.551,- |
| 2. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. 50.000.000,- |
| 3. Selisih Pembiayaan | Rp. |

IV. SILPA

Rp. 23.668.812,-

- KEDUA : Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 antara lain :
a. Terdapat SILPA;
b. Penggunaan Anggaran sudah sesuai ketentuan yang berlaku
: c. Tidak ditemukan penyimpangan
- KETIGA Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Lurah diminta untuk segera menyelesaikan Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023
- KEEMPAT : Lurah bersama Bamuskal agar segera menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Katongan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nglipar
pada tanggal 19 Januari 2024





PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812
 Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: Inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

BERITA ACARA ASISTENSI
PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APBKal)
TAHUN ANGGARAN 2023

KALURAHAN : KATONGAN
 KAPANEWON : NGLIPAR

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat telah diselenggarakan Asistensi Penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan dihadiri oleh Tim Asistensi dengan Pemerintah Kalurahan sebagai objek asistensi. Hasil Asistensi Penyusunan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban APBKal Tahun Anggaran 2023 berupa Catatan dan rekomendasi dapat diuraikan sebagai berikut:

No	Catatan	Rekomendasi
1	—	—

Tanggapan Obyek Pemeriksaan:

Kami sependapat atas kesimpulan asistensi dan akan segera kami lakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul maksimal tanggal 12 Januari 2024. Demikian Berita Acara ini dibuat berdasarkan kesepakatan dan tidak ada unsur paksaan dari masing-masing pihak.



DPMKAP2KB,

ARIS MUNANDAR, A.Md
 NIP. 199308262022031008

Kapanewon

KUNCARA ARI WIBAWA
 NIP. 198704031995031001

Wonosari, 11 Januari 2024
 Tim Inspektorat Daerah Kabupaten
 Gunungkidul

WIDODO, S.IP
 NIP. 197207151997031004

PUSPITA DWI ANGGRAINI, S.T
 NIP. 198708222022032007